
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pembangunan Riau (Daratan)

Oleh: Deliarnov

Abstract: Beginning from July 1, 2004 Kepulauan Riau formally divorced from Riau province. This will bring some impact not only on the sources of income, but also on the share and structure of economy, as well as the prime sectors and commodities of Riau province. Accordingly, Riau needs new development policies. The author suggests to identify economic sectors and commodities potential to be developed after Kepri divorced from Riau, and concludes that the best alternative is to develop agro-industry utilizing plantation commodities such as rubber, coconut, and especially palm-oil.

Key Words: Riau, Kepulauan Riau, share and structure of economy, sources of income, prime sectors and commodities, development policies, agro-industry, palm-oil.

Pendahuluan

Selama ini jika kita membaca berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Pemprov Riau hampir semuanya diawali dengan pernyataan bahwa Riau adalah provinsi yang kaya dengan sumberdaya alam seperti minyak dan gas bumi, mineral, kehutanan, perikanan, dan pertanian perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, sagu). Selain informasi bahwa Riau kaya dengan sumberdaya alam biasanya ada tambahan informasi bahwa Riau juga dikenal karena letaknya yang strategis dan besarnya potensi industri dan pariwisata di wilayah Riau Kepulauan, terutama di Batam dan di Bintan.

Itu dulu. Sekarang, suka atau tidak suka, mulai 1 Juli 2004 sebahagian wilayah yang akan tergabung dalam provinsi Kepri resmi lepas dari Riau. Sebagai konsekuensi dari lepasnya Kepri maka sumber penerimaan, bobot dan struktur ekonomi, serta sektor utama maupun komoditas andalan Riau (maksudnya Riau Daratan) akan mengalami perubahan.

Pertama, tentang sumber pendapatan dan penerimaan daerah. Dengan pisahnya Kepri maka sumber penerimaan daerah berubah sebagai implikasi berubahnya

wilayah (daratan dan lautan) berikut potensi yang ada di masing-masing wilayah. Karena wilayah berubah, maka bagi hasil sumberdaya alam yang diterima masing-masing kabupaten/kota baik yang tetap tergabung di Riau dan di Kepri akan berubah. Dalam diskusi akhir tahun 2003 tentang "Review Ekonomi Riau 2003 dan Outlook Ekonomi Riau 2004" sudah saya singgung bahwa dilihat dari pembagian dana bagi hasil sumberdaya alam ini sebetulnya Kepri rugi pisah dari Riau. Masalahnya, dana bagi hasil sumberdaya alam, terutama yang bersumber dari minyak dan hasil hutan tidak lagi mereka terima. Hal ini justru merupakan "rezeki nomplok" bagi kabupaten/kota yang tinggal, sebab bagi hasil tersebut akan diterima lebih besar oleh masing-masing kabupaten/kota sebab angka pembagi lebih kecil. Adapun "kerugian" bagi Riau dengan pisahnya Kepri ialah bahwa Riau selaku provinsi induk harus mengeluarkan dana pembinaan bagi Kepri. Tetapi secara keseluruhan keluarnya Kepri justru berdampak positif bagi kinerja ekonomi Riau (Daratan).

Kedua, tentang bobot perekonomian. Dari data BPS sumbangan seluruh kabupaten/kota yang akan menggabung

menjadi provinsi Kepri dalam PDRB Riau total tahun 2002 adalah 39,54 persen. Dengan demikian jika Kepri membentuk provinsi sendiri maka bobot perekonomian Riau untuk kawasan Riau Daratan tinggal 60,46 persen saja. Selain bobot perekonomian yang berubah, dengan pisahnya Kepri maka struktur ekonomi Riau Daratan akan berubah. Dalam hal ini hampir dipastikan struktur ekonomi Riau akan “memberat” kembali ke sektor primer, sebab sektor industri dan jasa selama ini lebih dominan di Batam dan Tanjung Pinang. Dari data yang ada tahun 2002 pertanian dan pertambangan menyumbang 63,5 persen. Dengan keluarnya Kepri maka *share* sektor primer bisa naik mencapai 70 persen atau lebih.

Terakhir, tentang sektor utama dan komoditas andalan. Selama ini dalam berbagai laporan pemda disebutkan bahwa sektor utama Riau adalah pertambangan (minyak bumi, gas alam, emas, timah), pertanian (perkebunan, kehutanan, perikanan), industri manufaktur (elektronik, *garments*, *basic chemicals*, *agro-industries*) dan jasa-jasa (turisme). Sekarang setelah Kepri resmi pisah maka bunyi laporan tersebut harus diubah, sebab dengan pisahnya Kepri maka tidak ada lagi yang namanya gas alam (Natuna), juga makin sedikit produk elektronik dan hampir tidak ada *garments* dan *basic-chemicals* serta makin berkurang *share* sektor transportasi terutama dari pelayaran dan turisme. Ekspor pasir laut juga harus dicoret dari daftar, kecuali jika ada eksploitasi baru di wilayah Riau yang tidak tergabung ke Kepri.

Implikasi terhadap Kebijakan Pembangunan

Karena perceraian dengan Kepri menyebabkan berubahnya wilayah, sumber penerimaan, bobot dan struktur ekonomi, serta sektor utama maupun komoditas andalan, maka sebagai implikasinya kebijakan pembangunan juga berubah. Untuk mengembangkan perekonomian daerah Riau (minus Kepri) langkah pertama yang harus

dilakukan ialah mengidentifikasi kembali potensi ekonomi daerah Riau, yaitu kemampuan ekonomi yang ada di provinsi Riau Daratan yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga dapat mendorong perekonomian dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Potensi ekonomi ditentukan oleh berbagai faktor: (1) sumberdaya alam (*natural resources*) yang akan dikembangkan, (2) sumberdaya manusia yang tersedia menurut tingkat pendidikan dan keahlian di berbagai sektor ekonomi, (3) modal untuk mengembangkan sumberdaya yang tersedia, (4) teknologi sebagai *factor shift* dalam kegiatan produksi, (5) manajemen (kemampuan memanfaatkan/meramu semua potensi yang ada) dan (6) budaya (*social capital*) yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam rangka mempersiapkan strategi pengembangan potensi daerah Riau maka keenam faktor produksi penentu pembangunan di atas perlu diidentifikasi kembali. Setelah mengidentifikasi kembali semua faktor penentu pembangunan tersebut di atas, maka dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di Propinsi Riau, langkah-langkah berikutnya yang perlu ditempuh antara lain:

- ❑ Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan (dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan di masing-masing sektor)
- ❑ Mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang rendah produktivitasnya dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas di sektor tersebut
- ❑ Mengidentifikasi sumberdaya dan faktor-faktor produksi yang ada yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan tiap sektor

Setelah semua proses identifikasi tersebut dilakukan maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengembangkan sektor-sektor andalan yang diperkirakan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian Riau dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kebijakan Agro-industri

Studi tentang identifikasi sektor-sektor utama dan produk andalan yang dimiliki oleh Riau setelah pisah dengan Kepri seperti dijelaskan di atas memerlukan studi yang lebih mendalam. Tetapi secara selintas dapat disimpulkan bahwa sesudah pisah dengan Kepri maka sektor industri manufaktur (terutama elektronik, *garments*, dan *basic chemicals*), dan jasa-jasa (turisme) serta transportasi pelayaran akan berkurang peranannya. Di sektor pertambangan kalau dulu ada minyak bumi, gas alam, emas, dan timah, sekarang yang masih tersisa hanya minyak bumi. Tetapi melihat kecenderungannya produksi minyak bumipun akan menurun, kecuali bila dilakukan pemulihan melalui *Enhanced Oil Recovery* (EOR). Sedangkan kemungkinan produksi naik hampir mustahil mengingat tidak adanya kegiatan eksploitasi dan eksplorasi baru sebagai dampak *euphoria* otonomi daerah.

Begitu juga potensi hutan makin tipis. Jangankan menambah kegiatan industri berbasis kehutanan, mempertahankan apa yang ada saja cukup sulit. Bahkan pada awal tahun 2004 ini minimal ada 5 perusahaan besar berbasis kehutanan yang bangkrut, yang menyebabkan PHK sekitar 30.000 orang. Eksploitasi hutan secara berlebihan selama ini diperkirakan akan “menuai masalah” dalam waktu tidak terlalu lama. Hal ini merupakan “PR” bagi dinas perindustrian, dinas ketenagakerjaan, dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Walaupun sudah terlambat, pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota (terutama yang sumbangan sektor kehutanannya besar seperti Siak,

Pelalawan, Rokan Hilir) dan provinsi Riau harus mencari solusi bagaimana melestarikan sumberdaya hutan bagi generasi mendatang secara berkelanjutan.

Kalau masa depan sektor pertambangan dan kehutanan makin gelap, apa lagi yang potensial dikembangkan dimasa datang? Pilihan sektor ekonomi yang ada tinggal sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Jadi, sebagai konsekuensi dari perubahan sektor dan komoditas andalan di atas maka dimasa depan Riau (Daratan) harus mampu menggarap sektor pertanian lebih profesional. Tetapi pengembangan sektor pertanian ada batasnya. Secara teoritis dalam sektor pertanian berlaku hukum “*the law of diminishing return*” dan “*Hukum Engel*”. Hukum yang pertama, yaitu “*the law of diminishing return*” mengatakan bahwa upaya pengembangan sektor ini cenderung memberikan hasil yang semakin lama semakin menurun, kecuali kalau ada teknik baru yang bisa mendongkrak produktivitas untuk seluas lahan yang sama. Sedangkan hukum kedua, yaitu hukum *Engel* mengatakan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, maka proporsi pengeluaran untuk pangan (yang disumbangkan sektor pertanian) akan semakin menurun, sedang proporsi pengeluaran untuk non-pertanian, terutama produk-produk industri, akan semakin meningkat.

Selain kedua hukum di atas membatasi pengembangan sektor pertanian, masih ada kontradiksi dalam dunia pertanian yang disebut “*the fallacy of composition*”. Fenomena ini menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian yang tinggi tidak identik dengan peningkatan pendapatan masyarakat petani secara keseluruhan. Jika seorang petani memperoleh hasil yang lebih tinggi, memang pendapatannya meningkat. Tetapi jika semua petani memperoleh hasil bagus maka harga bisa turun karena produksi melimpah, dan sebagai konsekuensinya pendapatan dan kesejahteraan petani justru turun. Karena adanya fenomena yang kurang

bersahabat dengan masyarakat tani tersebut maka sektor-sektor pertanian yang mempunyai “masa depan suram” seperti karet tak perlu diperluas. Cukup kebun karet yang ada dimanfaatkan secara optimal, sedangkan kalau karet sudah tidak lagi produktif perlu diganti dengan tanaman lain yang lebih kompetitif hasilnya.

Terbentur pada berbagai kendala yang kurang mendukung pengembangan sektor pertanian di atas, maka strategi yang paling cocok untuk diadopsi pada masa sekarang dan akan datang adalah mempromosikan kebijakan industrialisasi. Secara sederhana industrialisasi adalah perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri. Tetapi dalam arti lebih luas industrialisasi adalah proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan antar-negara seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan adanya perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri.

Riau tidak bisa bertahan hanya dengan memproduksi hasil-hasil pertanian. Harus ada pergeseran ke arah industri. Selain akan memberikan nilai tambah, industrialisasi akan “memaksa” masyarakat Riau lebih maju, sebab selain dilihat sebagai proses perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri belaka, industrialisasi juga harus diiringi dengan perubahan teknologi dan kultur dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industri modern. Adapun dua kata kunci untuk program industrialisasi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana ditulis Theodore W. Schultz dalam “Transforming Traditional Agriculture” (1964): “Peningkatan efisiensi di negara-negara sedang berkembang hanya mungkin lewat pengambil-alihan teknologi baru beserta pengetahuan dan keterampilan baru”.

Antara pertanian dan industri tidak harus bersaing, tetapi saling mendukung dan saling melengkapi. Dengan demikian sektor industri dan sektor pertanian dikembangkan secara terpadu (*integrated*), dimana

pengembangan sektor industri dilandaskan pada pertanian yang tangguh. Untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar, perlu dirancang program strategis untuk mengembangkan sektor industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil pertanian yang ada di Riau (daratan). Dikaitkan dengan hal ini industrialisasi di Riau sebaiknya dilakukan lewat pengembangan agro industri. Beberapa alasan untuk mendukung agro-industri ini antara lain (1) aktivitas agro-industri melibatkan banyak orang, (2) tidak memerlukan teknologi yang terlalu tinggi (*sophisticated*), dan (3) proses pergeseran dari pertanian ke agro-industri tidak menimbulkan masalah besar.

Sekarang, apa jenis agro-industri yang cocok dipromosikan? Produk-produk unggulan perkebunan Riau saat ini adalah kelapa sawit, karet, kelapa dan sedikit kopi serta coklat. Dari berbagai jenis komoditas perkebunan yang ada, yang memiliki keuntungan absolut dan keuntungan berbanding sekaligus paling potensial untuk meningkatkan nilai tambah dari perkebunan ini adalah industrialisasi kelapa sawit. Langkah industrialisasi kelapa sawit perlu diprioritaskan Riau sebab sepertiga dari total kebun kelapa sawit Indonesia seluas 3,5 juta hektar ada di Riau.

Strategi industrialisasi kelapa sawit yang disarankan untuk Provinsi Riau adalah yang memfokuskan pada perkembangan kelompok-kelompok industri seperti: (1) Industri-industri yang memakai kelapa sawit sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan berbagai jenis *downstream industries* yang berdaya saing tinggi, dan (2) Industri-industri mesin, alat-alat produksi, komponen, *spare-parts* dan material-material lain yang mendukung perkebunan kelapa sawit, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dilihat dari beragamnya kelompok-kelompok industri yang bisa dikembangkan dari sawit ini kelihatannya industrialisasi kelapa sawit sangat cocok dan mendukung Visi Riau 2020, dimana perkebunan kelapa

sawit bisa dijadikan sebagai sektor andalan atau tulang punggung (*backbone*) dan mesin penggerak perekonomian (*engine of growth*) sehingga dapat pula dijadikan sebagai sektor kunci (*key sector*) atau sektor pemimpin (*leading sector*) bagi perekonomian Riau, terutama untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan sekaligus menciptakan banyak lapangan kerja.

Dalam mengembangkan industrialisasi kelapa sawit perlu difikirkan kaitan ke belakang (*backward linkages*) dan kaitan ke depan (*forward linkages*). Misalnya pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit ke belakang akan mendorong pertanian kelapa sawit (bibit, obat-obatan, mesin dan peralatan seperti dodos, cangkul dan parang), sedangkan ke depan akan mendorong industri pengolahan lebih lanjut produk-produk derivatif kelapa sawit seperti CPO, minyak goreng, sabun, shampoo, margarine, olie dan banyak lagi yang lainnya.

Dilihat dari industrialisasi kelapa sawit ini terasa betul kita ketinggalan dari negara tetangga, Malaysia, yang saat ini diperkirakan mampu mengolah 95 persen sawitnya. Dengan menghasilkan berbagai produk derivatif kelapa sawit tersebut Malaysia menikmati nilai tambah berlipat ganda. Jika sawit dijual dalam bentuk CPO, nilainya hanya 350 dollar AS per ton. Tapi bila diolah lebih lanjut bisa bernilai 2000 dollar AS per ton.

Langkah sukses Malaysia di atas perlu dipelajari. Walaupun hasil "studi banding" para pejabat dan anggota legislatif Riau selama ini banyak dikecam, sebab tidak memberikan nilai tambah yang memadai, tetapi khusus untuk melihat contoh-contoh produk yang bisa dihasilkan dengan memanfaatkan bahan baku kelapa sawit ini saya dukung, asal dilakukan dengan serius. Kalau perlu pemma Riau ikut aktif mengirim berbagai pihak terkait untuk belajar atau magang ke berbagai instansi dan perusahaan yang menghasilkan produk derivatif kelapa sawit di Malaysia dalam bidang: (a) iptek, (b) inovasi, (c) management, dan (d) entrepreneurship.

Dampak Negatif Industrialisasi di Riau

Untuk saat ini bagi provinsi Riau industrialisasi adalah suatu keharusan, sebab hanya industrialisasi inilah yang akan menjamin kelangsungan proses ekonomi dalam jangka panjang. Walaupun industrialisasi penting bagi Riau, namun perlu dipahami bahwa industrialisasi itu sendiri bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan hanya sebagai salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan yang tinggi.

Peringatan dini perlu diberikan, sebab dari catatan yang ada masyarakat tempatan sering tidak merasakan manfaat kehadiran industri-industri yang ada di Riau, karena dalam prosesnya tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat tempatan. Bahkan dapat dikatakan industrialisasi di Riau lebih banyak menyumbang hal-hal negatif, seperti (a) hilangnya modal (lahan, hutan, sungai), (b) hilangnya mata pencaharian rakyat tempatan, (c) proses peminggiran dan eksploitasi rakyat, (d) pencemaran dan penurunan mutu lingkungan di dekat pabrik.

Dari catatan salah seorang peneliti di Riau terungkap bahwa tindakan eksploitasi yang paling nyata pada penduduk lokal adalah pengambil-alihan tanah oleh industri dan negara. Ada lahan yang diambil secara paksa tanpa ganti rugi, baik secara terang-terangan atau tanpa sepengetahuan penduduk, bahkan ada yang lahannya dicuri dan rumahnya dibakar pula. Ada lahan yang diambil dengan ganti rugi dengan harga yang dipatok/ditentukan pemerintah, dimana perusahaan membayar pada pemerintah, dan pemerintah membayar pada penduduk, sedang harga yang dibayarkan perusahaan jauh beda dari yang diterima penduduk, dimakan aparat korup.

Teknik lain yang sering digunakan untuk meminggirkan petani tempatan ialah dengan membuka kebun baru atau meluaskan pabrik dengan mengepung tanah penduduk, sehingga pada akhirnya karena tanah tidak

lagi layak untuk ditempati atau digunakan untuk bertani, terpaksa dijual kepada perusahaan. Terakhir, perusahaan juga sering menciptakan keadaan sedemikian rupa agar masyarakat menjual tanahnya, misalnya dengan mengembangkan sikap konsumtif seperti menganjurkan membangun rumah atau naik haji dengan menjual tanah, atau menakut-nakuti penduduk bahwa jika tanah tidak dijual sekarang, tanah tersebut akan diambil alih oleh pemerintah dengan ganti rugi lebih rendah.

Selain memarjinalkan petani dan masyarakat tempatan, kehadiran industrialisasi di Riau ternyata juga menyebabkan institusi atau lembaga desa banyak yang rusak, baik lembaga ekonomi desa, lembaga adat maupun lembaga sosial lainnya. Suatu hal yang ditakutkan ialah: jika penduduk kehilangan patron ekonominya, bisa terjadi apa yang oleh James C. Scott dalam "The Moral Economy of Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia" (1976) disebut "pemberontakan petani". Kenyataannya gejala ini sudah muncul, terlihat dari adanya pembakaran, perampokan dan pengrusakan milik perusahaan oleh masyarakat desa.

Selain berbagai dampak negatif yang disebutkan di atas, masih ada persoalan lain yang mungkin timbul dari kebijakan industrialisasi, terutama industrialisasi dengan strategi promosi ekspor. Salah satu permasalahan dengan kebijakan promosi ekspor yang bersifat *outward looking oriented* ialah bahwa pilihan kebijakan yang diambil bukan industri-industri yang padat karya, sebab industri yang terkait dengan produk derivatif kelapa sawit, kelapa dan karet lebih bersifat padat modal dan membutuhkan *knowledge* dan teknologi menengah dan tinggi. Hal ini, harus diakui, merupakan pilihan yang tidak gampang, sebab berpotensi menimbulkan ketidaksenangan dari pihak-pihak yang merasa terabaikan.

Untuk menghindari berbagai dampak negatif diatas, peran pemerintah daerah Riau

sangat diharapkan, agar mampu mensosialisasikan berbagai kebijakan yang akan diambil sehingga tidak mendapat resistensi dan tantangan dari berbagai lapisan dalam masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan perusahaan dan kepentingan buruh/karyawan dan masyarakat sekitar.

Demi kelancaran program industrialisasi, selain dapat berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan berbagai pihak terkait, Pemda diharapkan membantu dalam: penyediaan lahan, proses perizinan, pemberian fasilitas dan prasarana serta sarana yang dibutuhkan, sosialisasi dengan masyarakat tempatan, dan berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif (perpajakan yang lebih kompetitif, menghindari pungutan ini itu yang berlebihan, dan merancang program *community development* (CD) yang menguntungkan semua pihak terkait (*stake-holders*).

Perlunya Modal Sosial

Kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini di Riau memang mampu memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi kesenjangan sosial-ekonomi juga semakin membesar. Kenyataannya walau pertumbuhan ekonomi cukup pesat tetapi jumlah angka kemiskinan juga mengalami peningkatan dan pembangunan sosial agak terabaikan. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya provinsi Riau dalam melaksanakan pembangunan sosial ialah karena pembangunan selama ini hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, sedang unsur manusia sebagai subyek pembangunan agak terabaikan.

Untuk mengakomodasikan pembangunan sosial (*social development*) ini maka pada akhir-akhir ini terjadi suatu perubahan dalam paradigma pembangunan, dimana faktor-faktor yang paling diperlukan untuk mendorong pembangunan bukan sekedar sumberdaya alam (*natural*

resources), jumlah tenaga kerja (*human capital*), kapital finansial (*financial capital*) dan kapital fisik (*physical capital*) saja, tetapi yang lebih utama lagi adalah kapital sosial (*social capital*).

Modal sosial (*social capital*) tidak sama dengan modal budaya (*cultural capital*) atau modal manusia (*human capital*). Kalau modal budaya lebih mengarah pada kemampuan yang dimiliki individu yang diperoleh dari lingkungan keluarga atau lingkungan sosialnya, dan modal manusia lebih terfokus pada pengetahuan, pengalaman, kualitas yang dimiliki seseorang, sedangkan modal sosial sesuai definisi yang digunakan oleh Bank Dunia adalah sebagai: "*The norms and social relations embedded in the social structures of societies that enable people to coordinate action to achieve desired goals*".

Dari definisi di atas jelas bahwa modal sosial adalah norma dan hubungan sosial yang menyatu dalam struktur sosial masyarakat yang mampu mengkoordinasikan tindakan dalam mencapai tujuan. Yang jelas, modal sosial bukan milik individu, tetapi

sebagai hasil dari hubungan sosial antar individu (Ibrahim, 2002).

Yang paling penting dari modal sosial ialah ada norma dan hubungan sosial yang menyatu (*connectedness*) dalam struktur masyarakat yang membuat orang dapat bekerjasama dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Putnam (1993) dan Fukuyama (1995) memperjelas dengan memperluas batasan bahwa modal sosial tidak pada individu, tetapi pada kelompok, komunitas, bahkan di tingkat provinsi dan negara.

Dikaitkan dengan apa yang dikemukakan di atas berbagai komunitas yang ada di Riau harus mampu membangun modal sosial melalui pengembangan hubungan aktif, partisipasi demokrasi dan penguatan kepemilikan dan kepercayaan komunitas. Untuk itu perlu ada program-program untuk membuat masyarakat Riau lebih optimis dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Tidak apatis, apalagi anarkis. Motto: "Kerja seribu, tidak kerja lima ratus, kerja tak kerja seribu lima ratus" tak perlu dilestarikan.

Daftar Bacaan

- Balassa, Bela. 1981. "The Process of Industrial Development and Alternative Development Strategies," in The Newly Industrializing Countries in the World Economy. New York: Pergamon
- Bates, Robert, 1992, Beyond the miracles of the market. New York: Cambridge University.
- Deliarnov, 2003, "Review Ekonomi Riau dan Outlook Ekonomi Riau 2004", makalah disampaikan dalam Diskusi Ekonomi Akhir Tahun, Pekanbaru, 20 Desember.
- Fukuyama, Francis. 2000. The Great Disruption, Human Nature and The Reconstruction of Social Order. New York: Touchstone.
- Ibrahim, Linda Darmajanti. 2002. "Kehidupan Berorganisasi sebagai Modal Sosial Komunitas Jakarta", dalam Masyarakat: Jurnal Sosiologi. Edisi No. 11.
- Mashuri dan Syarif Hidayat, 2001, Menyingkap Akar Persoalan Ketimpangan Ekonomi di Daerah: Sebuah Kajian Ekonomi Politik, Jakarta: PT Pamarator
- Putnam, Robert D. 1993. "The Prosperous Community, Social Capital and Public Life", in The American Prospect No. 13 (Spring).
- Rachbini, Didik J., 1996, Perspektif Ekonomi Politik Baru. Jakarta: CIDES
- Rauf, Maswadi. 2003. Industrialisasi, Keadilan Sosial, dan Demokrasi. Butir-butir Penyajian dalam Lokakarya Pembukaan Program Doktor Ilmu-ilmu Sosial UNRI, Pekanbaru, 26 Juli
- Scott, James C., 1985, Moral Ekonomi Petani, Jakarta: LP3ES.
- Staniland, Martin, 1985, What is Political Economy?, New Heaven: Yale University Press.
- Wade, Robert. 1989. Governing the Market. Princeton (NJ): Princeton University Press